

Integrasi Potensi *Heritage* dalam Pengembangan Inovasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen: Jejak Sejarah Ambalresmi

Integration of Cultural Heritage Potential in Regional Development Planning Innovation in Kebumen Regency: Ambalresmi's Historical Traces

Bagus Anggit Saroyo^{1) a)*}, Nur Khamid^{2) b)}

¹⁾ Administrasi Publik, Universitas Negeri Yogyakarta

^{a)} Jl. Colombo No. 1 Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281

²⁾ Universitas Diponegoro

^{b)} Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50275

*Email: bagusanggit.3452@gmail.com

Naskah Masuk: 12 Mei 2026 Naskah Revisi: 22 Juni 2026 Naskah Diterima: 25 Juni 2026

ABSTRACT

Historical and cultural heritage constitutes a strategic asset that plays a vital role in shaping regional identity while supporting sustainable development. Kebumen Regency possesses a diverse range of heritage assets, including those located in Ambalresmi Village such as the Ambal Duchy Complex, Kepatihan Building, Al-Musthofa Kauman Mosque, Mbah Jogoresmi Cemetery, and Kampung Jawa. However, this potential has not yet been optimally integrated into regional development planning. This study aimed to analyze the potential integration for integrating Ambalresmi's heritage into innovative regional development planning in Kebumen Regency. The study employs a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observation, documentation, and literature review, then analyzed using triangulation techniques. The findings indicate that Ambalresmi's heritage possesses substantial potential to support cultural tourism development, historical education, local identity reinforcement, and community-based creative economic activities. Furthermore, integrating heritage assets into regional planning can contribute to sustainable cultural preservation while generating socio-economic benefits for local communities. Effective integration requires policy support, stakeholder collaboration, spatial planning alignment, and the incorporation of heritage considerations into regional development agendas. Therefore, heritage-based planning innovation should not merely focus on economic growth but also contribute to strengthening regional identity, social cohesion, cultural sustainability, and inclusive regional development in Kebumen Regency.

Keywords: Ambalresmi, cultural heritage, local identity, regional development planning, regional innovation

ABSTRAK

Warisan sejarah dan budaya (heritage) merupakan aset strategis yang berperan penting dalam membentuk identitas daerah sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Kebumen memiliki beragam potensi heritage, salah satunya berada di Desa Ambalresmi, seperti Kompleks Kadipaten Ambal, Kepatihan, Masjid Kauman Al-Musthofa, Makam Mbah Jogoresmi, dan Kampung Jawa. Namun, potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi integrasi heritage Ambalresmi dalam inovasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa heritage Ambalresmi memiliki nilai historis, sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kawasan wisata budaya, pusat edukasi sejarah, penguatan identitas lokal, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis masyarakat. Integrasi heritage ke dalam perencanaan pembangunan daerah memerlukan dukungan kebijakan, penguatan regulasi, keselarasan tata ruang, serta kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas budaya, dan sektor swasta. Integrasi tersebut berpotensi mendorong pelestarian budaya secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dengan demikian, inovasi perencanaan pembangunan berbasis heritage tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan identitas daerah, peningkatan kohesi sosial, pelestarian budaya, dan terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kata kunci : Ambalresmi, heritage, identitas lokal, inovasi daerah, perencanaan pembangunan daerah

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan dapat dimaknai sebagai proses penyusunan langkah-langkah kegiatan secara sistematis yang melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan daerah, dengan tujuan menentukan arah pemanfaatan dan mengalokasikan sumber daya daerah secara optimal berdasarkan potensi yang ada, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu (Ra'is et al., 2020). Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik dan ekonomi konvensional, tetapi juga menggali serta mengintegrasikan potensi non-material yang memiliki nilai strategis bagi pembangunan jangka panjang. Seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan globalisasi, pembangunan daerah kini semakin menekankan pentingnya inovasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan efektivitas kebijakan publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, menegaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaksanakan inovasi daerah sebagai Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat. Inovasi tersebut diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, serta penguatan daya saing daerah, dan perlu didukung oleh regulasi yang memadai agar dapat berjalan lebih efektif. Inovasi perencanaan Pembangunan menjadi instrumen strategis untuk menjawab berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kesenjangan antar wilayah, dan tuntutan peningkatan kesejahteraan. Perencanaan Pembangunan daerah tak lagi hanya berorientasi pada aspek fisik dan ekonomi saja, tetapi juga harus bisa mengintegrasikan dimensi sosial dan budaya sebagai bagian dari strategi dalam pembangunan berkelanjutan.

Sejalan dengan peran dari inovasi daerah sebagai pendorong pembangunan, situs *heritage* di Kabupaten Kebumen dapat menjadi fondasi kultural yang bisa memperkuat arah dari inovasi pembangunan tersebut. Kabupaten Kebumen memiliki beragam warisan budaya dan sejarah, baik berupa benda maupun tak benda, seperti situs bersejarah, tradisi masyarakat, seni budaya, serta penamaan wilayah yang sarat

makna historis dan filosofis (Sabila & Suswandi, 2025). Kekayaan *heritage* ini tidak hanya merepresentasikan identitas dan perjalanan sejarah masyarakat Kebumen, tetapi juga memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan inovatif yang berbasis pada kearifan lokal. Melalui pemanfaatan teknologi, penguatan ekonomi kreatif, dan pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan, warisan budaya dapat dikelola secara lebih adaptif tanpa menghilangkan nilai aslinya.

Salah satu kawasan di Kabupaten Kebumen yang memiliki potensi warisan budaya dan sejarah bernilai historis, sosial, dan ekonomi tinggi adalah Desa Ambalresmi. Secara historis, Ambalresmi merupakan ruang hidup bagi masyarakat yang menyimpan tradisi, adat istiadat, peninggalan budaya, serta sejarah yang diwariskan secara turun-temurun dan membentuk identitas lokal. Nilai sejarah tersebut tidak hanya merepresentasikan kondisi pada masa lalu, tetapi juga berfungsi sebagai sumber untuk pembelajaran dalam memahami dinamika sosial budaya daerah. Dari aspek sosial, kawasan *heritage* Ambalresmi berperan dalam memperkuat kohesi dan modal sosial masyarakat melalui pelestarian kearifan lokal serta partisipasi aktif warga dalam menjaga keberlanjutan budaya. Dari sisi ekonomi, potensi *heritage* Ambalresmi dapat dikembangkan sebagai basis ekonomi kreatif dan pariwisata budaya yang berkelanjutan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan tanpa mengabaikan aspek pelestarian budaya dan sejarah. Pada tingkat nasional, pariwisata berbasis warisan budaya menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian budaya dan juga nilai sejarah (Anggratyas et al., 2025).

Meskipun Desa Ambalresmi memiliki potensi warisan budaya yang bernilai historis, sosial, dan ekonomi yang tinggi, pemanfaatannya hingga saat ini belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kesenjangan antara potensi *heritage* Ambalresmi dengan arah dan implementasi kebijakan pembangunan Kabupaten Kebumen, sehingga warisan budaya dan sejarah di wilayah tersebut belum mendapat posisi sebagai aset strategis daerah dalam

mendorong inovasi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pelestarian warisan budaya harus dilakukan melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Namun, prinsip tersebut belum sepenuhnya terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Penelitian Terdahulu yang dilakukan oleh Sekarsari dan Putra (2023) dengan judul Analisis Pembangunan Kayutangan *Heritage* Dari Formulasi Sampai dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang berfokus pada evaluasi optimalisasi implementasi kebijakan pembangunan Kawasan Kayutangan *Heritage* di Kota Malang, dengan menganalisis persepsi, kepercayaan, dukungan masyarakat, serta dampak sosial yang ditimbulkan melalui pendekatan metode campuran (*mixed method*). Sedangkan penelitian dari Fahril dan Kurniati (2018) berfokus pada identifikasi tipologi pelestarian urban *heritage* melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan bangunan cagar budaya di lima Kawasan Cagar Budaya (KCB) Kota Yogyakarta sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep liveable city. Berdasarkan kedua penelitian terdahulu yang berfokus pada evaluasi kebijakan *heritage* yang telah berjalan dan tipologi pelestarian bangunan yang sudah ditetapkan secara formal, penelitian ini mengisi celah dengan mengkaji integrasi potensi *heritage* yang belum terinternalisasi secara formal ke dalam inovasi perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan kebijakan, tata ruang, regulasi, dan pemangku kepentingan secara terpadu.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi warisan budaya dan sejarah (*heritage*) Ambalresmi dalam inovasi perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi nilai historis, sosial, dan ekonomi yang dimiliki *heritage* Ambalresmi serta mengkaji keterkaitannya dengan kebijakan dan praktik perencanaan pembangunan daerah. Kontribusi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian perencanaan pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan warisan budaya sebagai sumber daya strategis pembangunan. Selain itu, hasil

penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dan empiris bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan perencanaan pembangunan yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong pelestarian budaya dan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Heritage

Heritage atau warisan budaya merupakan seluruh peninggalan budaya yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, serta identitas suatu masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pengertian *heritage* merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa warisan budaya mencakup benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang perlu dilestarikan karena nilai pentingnya bagi kebudayaan bangsa. *Heritage* dalam konteks budaya dapat diartikan sebagai warisan budaya yang diteruskan dari generasi ke generasi dan meliputi sejarah, seni, arsitektur, tradisi, dan kepercayaan yang menjadi bagian dari identitas suatu bangsa atau masyarakat” (Ikatanindas, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Kesaulya dkk, (2025), warisan budaya (*heritage*) dapat dipahami sebagai representasi identitas dan karakter khas suatu wilayah yang terbentuk dari proses sejarah panjang, sehingga keberadaannya memiliki nilai penting tidak hanya sebagai sumber pengetahuan ilmiah, tetapi juga sebagai cerminan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan untuk menjaga keberlanjutan identitas masyarakat setempat.

Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa esensi dari perencanaan pembangunan merupakan kegiatan dalam menentukan arah kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbagai metode dan alur kegiatan yang sistematis dengan melihat kualitas sumber daya yang dimiliki. Perencanaan pembangunan daerah berperan sebagai pijakan strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keberlanjutan lingkungan pada skala lokal. Walaupun setiap

daerah memiliki karakteristik dan istilah perencanaan yang berbeda, pada prinsipnya proses perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui tahapan yang runtut, terarah, dan saling berkaitan satu sama lain (Diklat LPKN, 2025). Selaras dengan penjelasan tersebut Perencanaan pembangunan daerah dapat diartikan sebagai suatu proses pengorganisasian berbagai fase kegiatan secara terstruktur yang melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan, dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan dan pendistribusian sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien, sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah atau kawasan dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (Halimah & Kurniati, 2025).

Inovasi

Inovasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan banyak orang dan makhluk hidup karena memberikan sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya, baik berupa barang nyata maupun ide abstrak yang bermanfaat banyak pihak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Inovasi dapat dimaknai sebagai suatu rangkaian proses yang meliputi penciptaan, pengembangan, hingga implementasi gagasan baru yang mengandung nilai tambah signifikan, di mana pemikiran kreatif tersebut ditransformasikan menjadi solusi yang aplikatif dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik berupa produk, layanan, proses, maupun model bisnis, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan daya saing dan kemajuan suatu organisasi atau wilayah (Hilman & Armadi, 2025).

Integrasi

Integrasi didefinisikan proses asimilasi sampai membentuk satu kesatuan yang utuh. Definisi ini menekankan bahwa integrasi bukan sekadar penggabungan unsur-unsur yang berbeda, melainkan suatu proses berkelanjutan yang melibatkan penyesuaian, penyelarasan,

dan saling keterkaitan antar elemen sehingga tercipta kesatuan yang harmonis. Selain itu integrasi juga dapat diartikan sebagai proses penyatuan berbagai elemen yang berbeda menjadi satu kesatuan yang utuh, yang bisa diaplikasikan dalam bidang sosial, budaya, dan nasional untuk mencapai tujuan Bersama (Sampoerna University, 2024). Secara etimologis, istilah integrasi dapat ditelusuri asal-usulnya dari bahasa Latin yang mengandung makna keseluruhan atau komprehensif, sehingga secara konseptual istilah ini merujuk pada upaya penyatuan berbagai bagian atau elemen menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi (Rustamana et al., 2026).

Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan kerangka konseptual yang menghubungkan tiga konsep utama yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pada tahap awal, *heritage* atau warisan budaya dipahami sebagai aset yang memiliki nilai sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Konsep ini dipadukan dengan inovasi daerah sebagai upaya mempercepat pembangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017, serta perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui RPJMD, RTRW, dan RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Ketiga konsep tersebut menjadi dasar dalam proses integrasi yang dilakukan melalui pendekatan *adaptive reuse* (pemanfaatan kembali bangunan atau kawasan bersejarah), digitalisasi *heritage*, dan kolaborasi berbagai pihak. Proses ini dipengaruhi oleh tiga faktor penting, yaitu dukungan regulasi melalui Peraturan Daerah tentang cagar budaya, pengakuan *heritage* dalam tata ruang wilayah sebagai kawasan lindung, serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah, komunitas budaya, akademisi, dan sektor swasta. Faktor-faktor tersebut menentukan keberhasilan strategi implementasi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari inventarisasi Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) dalam jangka pendek, penyusunan Perda dan pengembangan desa wisata berbasis *heritage* dalam jangka menengah, hingga digitalisasi serta penguatan ekonomi kreatif dalam jangka panjang. Output dalam penelitian ini diharapkan dapat terintegrasinya potensi

heritage khususnya di Kabupaten Kebumen khususnya pada situs *heritage* Desa Ambalresmi dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen sehingga mampu memperkuat identitas daerah, menjadi dasar pengembangan program Pembangunan berbasis kearifan lokal, dan mendukung Pembangunan daerah yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada penafsiran makna di balik fenomena, interaksi, dan perilaku subjek secara kontekstual, bukan pada pengukuran statistik (Fiantika et al., 2022). Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam mengenai peristiwa, interaksi, pengalaman, dan perilaku subjek melalui interaksi langsung. Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendetail suatu permasalahan, fenomena, atau situasi sesuai dengan kondisi aktual yang terjadi di lapangan (Fiantika et al., 2022).

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Kebumen Khususnya Desa Ambalresmi. Lokasi ini dipilih karena memiliki jejak sejarah yang penting bagi kabupaten kebumen dan memiliki potensi untuk pembangunan kabupaten kebumen. Subjek dalam penelitian ini melibatkan pengurus pokdarwis Desa Ambalresmi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui hasil observasi dan juga dokumentasi pada objek yang sudah ditentukan, sedangkan data sekunder diambil melalui studi pustaka pada dokumen resmi seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada penelitian kali ini, teknik pengecekan keabsahan data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi merupakan cara memvalidasi data dalam penelitian kualitatif melalui perbandingan dan pengecekan silang antar sumber data, metode pengumpulan data, peneliti, maupun kerangka teori yang digunakan (Cresswell, 2013). Teknik triangulasi yang dipakai adalah teknik triangulasi metode. Triangulasi metode diterapkan dengan menggabungkan beberapa metode

pengumpulan data untuk menggali informasi yang sama, sehingga konsistensi temuan dapat diverifikasi. Lalu pada tahapan Analisis data pada penelitian ini melibatkan tiga tahapan, yakni kondensasi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Miles et al., 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Situs Heritage Ambalresmi



Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar 1.
Kadipaten Ambal

Pada awal abad ke-19, Kecamatan Ambal merupakan wilayah administratif yang berstatus sebagai Kadipaten atau Kabupaten dengan pusat pemerintahan di Desa Ambalresmi dan termasuk ke dalam wilayah Bagelen. Kadipaten Ambal memiliki peran yang strategis dalam struktur pemerintahan kolonial di pesisir selatan Jawa, serta berada di bawah kepemimpinan dari K. R. A. H. Poerbonegoro pada periode 1828–1872 M. Keberadaan kadipaten ini secara historis dapat ditelusuri sejak tahun 1828, bertepatan dengan masa Perang Diponegoro sebagai salah satu periode penting dalam sejarah perlawanan terhadap kolonialisme di Jawa, khususnya di pesisir selatan.

Secara administratif, Kabupaten Ambal didirikan pada tahun 1827 dan mulai berfungsi secara efektif pada tahun-tahun berikutnya, meskipun eksistensinya tidak berlangsung lama. Setelah wafatnya K. R. A. H. Poerbonegoro pada 7 Maret 1871, pemerintahan Kadipaten Ambal mulai dihapuskan. Pada tahun 1872, pemerintah kolonial secara resmi membubarkan Kabupaten Ambal dan melakukan restrukturisasi wilayah Bagelen menjadi tiga satuan administratif, yaitu Kabupaten Kutoarjo yang kini berstatus sebagai Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Kebumen sebagai pusat pemerintahan daerah, serta

Kabupaten Karanganyar yang saat ini menjadi Kecamatan Karanganyar.

Dari sisi peninggalan fisik, bangunan yang masih tersisa dari kompleks Kadipaten Ambal hingga kini adalah rumah dinas bupati. Pada masa lalu, di bagian depan bangunan tersebut terdapat pendopo yang berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan sekaligus simbol kekuasaan lokal. Namun, pada tahun 1829, pendopo ini dipindahkan ke Karanganyar seiring dengan perubahan orientasi pusat administrasi, yang menandai awal pergeseran peran Ambal dalam struktur pemerintahan regional. Selanjutnya, pada tahun 1872, melalui kebijakan reorganisasi pemerintahan kolonial di pesisir selatan Jawa, seluruh urusan pemerintahan secara resmi dipindahkan dari Ambal ke Karanganyar yang ditetapkan sebagai pusat administrasi baru. Kebijakan ini tidak hanya mengakhiri kedudukan Ambal sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan mendasar terhadap dinamika politik, sosial, dan ekonomi wilayah tersebut.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Gambar 2.

Kepatihan Ambal

Kepatihan atau Kawedanan Ambal dibangun bersamaan dengan berdirinya Kadipaten Ambal pada tahun 1827 Masehi. Wedana pertama yang memimpin wilayah Ambal adalah Raden Joyo Atmojo yang menjabat pada periode 1827–1872. Bangunan Kepatihan yang masih ada hingga kini diperkirakan merupakan hasil pembangunan kembali atau pemugaran pada tahun 1952. Di halaman bangunan terdapat tujuh tiang, enam di antaranya berukuran besar yang melambangkan enam putra Wedana yang telah dewasa, sedangkan satu tiang berukuran lebih kecil merepresentasikan para cucunya. Simbolisme ini mencerminkan kuatnya nilai kekerabatan

dan tradisi dalam struktur kepemimpinan lokal pada masa tersebut. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda hingga awal kemerdekaan, kawedanan merupakan satuan pemerintahan di bawah kabupaten (*afdeling*) yang membawahi beberapa kecamatan (*onderdistrict*). Kepatihan Ambal berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan wilayah Ambal serta menjadi perpanjangan tangan bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengendalian wilayah.

Sebelum secara definitif menjadi bagian dari Kabupaten Kebumen, kawasan Ambal, termasuk wilayah berdirinya Kepatihan, konon merupakan bagian dari wilayah mancanegara Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-19 Ambal menempati posisi strategis sebagai daerah perbatasan kekuasaan Kesultanan Mataram di pesisir selatan Jawa. Letak geografis tersebut menjadikan Ambal penting dalam dinamika politik dan pertahanan, sekaligus sebagai penghubung antara pusat kekuasaan dan wilayah pesisir.

Di bagian belakang kompleks Kepatihan masih terdapat sebuah sumur tua yang diperkirakan sezaman dengan bangunan utama. Keberadaan sumur ini tidak hanya berfungsi secara utilitarian, tetapi juga menjadi penanda kesinambungan pemanfaatan kawasan sejak masa pemerintahan tradisional hingga kolonial. Hingga kini, rumah Kepatihan masih dihuni oleh keturunan Patih atau Wedana, serta menyimpan berbagai dokumentasi keluarga, termasuk foto-foto lama yang merekam jejak genealogis dan sejarah kepemimpinan lokal.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Gambar 3.

Kampung Jawa

Kampung Jawa merupakan kawasan budaya yang memiliki bangunan joglo sebagai representasi arsitektur tradisional masyarakat Jawa. Joglo memiliki karakter konstruksi tahan

terhadap gempa melalui sistem sambungan pasak kayu dan ikatan tali tanpa menggunakan paku besi, yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengantisipasi kondisi geografis Jawa yang terhadap rawan bencana sekaligus menunjukkan tingginya pengetahuan teknis masyarakat tradisional dalam bidang arsitektur. Selain itu, Kampung Jawa juga dilengkapi dengan berbagai unsur kesenian tradisional, seperti gamelan, wayang, dan permainan rakyat, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai ruang untuk memamerkan arsitektur khas masyarakat Jawa, tetapi juga sebagai pusat aktivitas budaya. Saat ini, bangunan joglo dan area lapangan dimanfaatkan sebagai ruang untuk pertemuan, tempat penyelenggaraan kegiatan seni, serta sanggar pelatihan yang mendukung proses pewarisan nilai-nilai budaya Jawa kepada para generasi muda.

Kampung Jawa diresmikan pada 17 Maret 2018 sebagai bagian dari upaya sistematis pelestarian budaya daerah dan dikembangkan sebagai sarana wisata edukasi untuk memperkenalkan tradisi, seni, serta arsitektur Jawa kepada masyarakat dan pengunjung. Keberadaannya melengkapi kampung tematik lain di Kabupaten Kebumen, seperti Kampung Inggris di Desa Jatijajar, Kecamatan Ayah; Kampung Arab di Desa Tanjungsari, Kecamatan Petanahan; dan Kampung Sapi di Desa Sidirejo, Kecamatan Puring, yang lebih dulu diresmikan.

Pemilihan Desa Ambalresmi sebagai desa yang memiliki kampung Jawa didasarkan pada pertimbangan secara historis dan kultural, antara lain keberadaan rumah mantan Bupati Ambal Poerbonegoro dan bangunan SD Negeri 1 Ambalresmi yang berstatus sebagai cagar budaya, serta masih banyaknya rumah warga bergaya srotong khas Kabupaten Kebumen. Kondisi tersebut menegaskan bahwa Ambalresmi sebagai kawasan yang mempertahankan lanskap budaya tradisional. Dari sisi sosial budaya, desa ini juga didukung oleh sumber daya manusia berupa seniman khususnya dalang, pengrawit, penari, dan seniman kethoprak, yang menjadi modal penting dalam mengembangkan Kampung Jawa melalui pertunjukan, pelatihan, dan kegiatan edukasi budaya.



Sumber: Bapperida Kabupaten Kebumen, 2025

Gambar 4.

Kompleks Makam Mbah Jogoresmi

Kompleks Makam Mbah Jogoresmi terletak di sebelah utara dari kompleks Pasar Ambal, tepatnya berada di Desa Ambalresmi RT 03/RW 01, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kompleks makam ini dibangun pada tanggal 1 April 1979 dan hingga kini menjadi salah satu situs sejarah penting yang merepresentasikan tokoh lokal yang berpengaruh dalam pembentukan wilayah Ambal, baik secara sosial maupun secara historis. Tokoh masyarakat yang dimakamkan di tempat ini dikenal dengan nama Ki Jogoresmi atau lebih akrab disebut dengan Mbah Jogoresmi. Ia merupakan sesepuh sekaligus pendiri Kampung atau Dukuh Jogoresmen yang dalam pelafalan masyarakat Ambal sering disebut Jogoresmen. Dalam cerita yang beredar Mbah Jogoresmi dikenal sebagai salah satu panglima perang Kesultanan Mataram. Peran utamanya adalah melakukan pemetaan situasi wilayah serta mempersiapkan lumbung dan sistem logistik bersama para tokoh yang lain, yakni Jagawisa dan pasukannya. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, Mbah Jogoresmi menetap di wilayah Ambal hingga akhir hayatnya dan kemudian dimakamkan di lokasi yang kini menjadi kompleks makam.



Sumber: Dokumentasi Youtube Aku dan Jalanan, 2024

Gambar 5.

Makam Mbah Jogo Wiso

Keberadaan Mbah Jogoresmi juga memiliki keterkaitan erat dengan toponimi Desa Ambalresmi. Berdasarkan catatan sejarah lokal, nama Ambalresmi berasal dari gabungan dua kata, yaitu “Ambal” dan “Resmi”. Kata “Ambal” merujuk pada keberadaan Kadipaten Ambal yang pada masa pemerintahan Adipati Poerbonegoro hanya memiliki satu sungai utama atau satu ambal dalam istilah bahasa Jawa. Sementara itu, kata “Resmi” diambil dari nama Jogoresmi, sebagai bentuk penghormatan terhadap peran tokoh tersebut dalam sejarah pembentukan dan penjagaan wilayah.



Sumber: Dokumentasi Penulis, 2025

Gambar 6.

Selasar Masjid Kauman Al-Musthofa

Masjid Kauman Al-Musthofa merupakan salah satu bangunan bersejarah yang memiliki nilai religius dan kultural yang tinggi di wilayah Ambal. Masjid ini didirikan pada tanggal 17 Rabiulawal 1247 Hijriah atau bertepatan dengan 25 Agustus 1821 Masehi. Proses pembangunannya telah dimulai sejak tahun 1818, yang pada awalnya direncanakan berlokasi di Wawar, Tlogo. Namun, akibat terjadinya peristiwa pemberontakan Gamawijaya, rencana tersebut dibatalkan dan lokasi pembangunan dipindahkan hingga akhirnya masjid didirikan di Ambal. Secara arsitektural, Masjid Kauman Al-Musthofa memiliki keunikan yang tercermin pada mimbar dan struktur bangunannya. Ukiran mimbar menunjukkan kemiripan dengan mimbar masjid di Kota Gede dan Banyu Sumurup, yang mengindikasikan adanya kesesuaian gaya seni

ukir tradisional Jawa-Islam. Pada bagian mimbar tercantum angka tahun 1264 Hijriah atau 1842 Masehi, yang menunjukkan waktu dari pembuatan mimbar tersebut dan memperkirakan bahwa masjid telah mengalami pengembangan beberapa tahun setelah pendiriannya. Selain itu, pada bagian soko guru atas terdapat candra sengkala yang menandai tahun berdirinya bangunan masjid. Informasi serupa juga ditemukan di serambi sisi selatan yang usianya lebih muda, berupa candra sengkala bertuliskan aksara Arab Pegon yang dihiasi motif ukiran lung-lungan.



Sumber: Bapperida Kabupaten
Kebumen, 2025

Gambar 7.

Mimbar Masjid Kauman Al-Musthofa

Dalam konteks tata ruang tradisional Jawa, masjid ini pada masa lalu berada di hadapan alun-alun Ambal. Keberadaan alun-alun sebagai ruang terbuka publik merupakan salah satu unsur utama dalam struktur kota tradisional Jawa yang berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial, keagamaan, dan pemerintahan. Namun, seiring dari perkembangan permukiman, alun-alun tersebut kini tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya dan telah berubah menjadi kawasan hunian serta pekarangan warga. Meskipun demikian, Masjid Kauman Ambalresmi masih mempertahankan keberadaan gerbang masuk yang telah ada sejak masa awal pendiriannya, sehingga memperkuat

karakter historis pada kawasan tersebut. Dari aspek kelembagaan keagamaan, Masjid Kauman Al-Musthofa berfungsi sebagai Masjid Jami' bagi masyarakat Ambal dan sekitarnya. Pada bagian soko guru dalam terpasang struktur utama masjid, sementara bagian sayap luar berada di wilayah Petukuhan Mirit. Tokoh agama yang pernah memimpin pada masjid ini antara lain Kanjeng Kyai Mustofa, yang menjabat sebagai penghulu selama kurang lebih 15 tahun, dan kemudian dilanjutkan oleh K. Yahya. Adapun khatib yang tercatat dalam sejarah masjid Kauman Al-Musthofa ini adalah Kyai Imam Rofi'ngi.

Posisi *Heritage* Ambalresmi dalam RPJMD Kabupaten Kebumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, serta arah kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu lima tahun, sehingga posisi suatu potensi sumber daya di dalam RPJMD sangat menentukan derajat dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang akan diterimanya. Peraturan Daerah Kabupaten Kebum Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, (2025) disusun dengan visi pembangunan "Kebumen Berdaya: Beriman, Maju, Sejahtera, dan Berbudaya", yang dijabarkan ke dalam lima sektor prioritas, yaitu pengentasan kemiskinan, pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, serta percepatan reformasi birokrasi.

Frasa "Berbudaya" pada rumusan visi tersebut secara normatif membuka ruang bagi pengarusutamaan warisan budaya sebagai salah satu orientasi pembangunan daerah. Akan tetapi, apabila ditelaah pada kelima sektor prioritas yang ditetapkan, belum terdapat program prioritas yang secara eksplisit menempatkan pelestarian dan pemanfaatan *heritage*, termasuk situs-situs di Desa Ambalresmi, sebagai agenda pembangunan yang berdiri sendiri. Perhatian pemerintah daerah terhadap dimensi "warisan" pada periode RPJMD ini cenderung lebih banyak diarahkan pada upaya mempertahankan status Geopark Kebumen sebagai UNESCO Global Geopark, yang merupakan warisan geologi (*geoheritage*), sementara warisan sejarah dan budaya (*cultural heritage*) seperti kompleks Kadipaten Ambal,

Kepatihan, Masjid Kauman Al-Musthofa, Makam Mbah Jogoresmi, dan Kampung Jawa belum memperoleh penekanan kebijakan yang setara.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *heritage* Ambalresmi memiliki ruang konseptual untuk diintegrasikan ke dalam visi "Berbudaya" RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029, tetapi secara operasional posisinya masih bersifat implisit dan belum diterjemahkan ke dalam program prioritas, indikator kinerja, maupun pagu anggaran yang spesifik. Implikasinya, keberlanjutan pengelolaan *heritage* Ambalresmi masih sangat bergantung pada inisiatif lintas perangkat daerah, bukan pada mandat kebijakan yang terstruktur dalam dokumen perencanaan utama daerah.

Posisi *Heritage* Ambalresmi dalam RTRW Kabupaten Kebumen

Selain pada dokumen RPJMD, posisi *heritage* dalam dokumen keruangan turut menentukan keberlanjutan perlindungannya, karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen hukum yang mengatur peruntukan dan pemanfaatan ruang secara mengikat bagi seluruh pemangku kepentingan. Kabupaten Kebumen telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044 (2024), yang disahkan setelah melalui proses penyusunan sejak tahun 2017 untuk mengatur pemanfaatan tata ruan daerah Kabupaten Kebumen. Dalam rencana pola ruang yang diatur oleh Perda tersebut, kawasan cagar budaya termasuk ke dalam kategori kawasan peruntukan lindung, bersanding dengan kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan rawan bencana.

Secara struktur ruang, Kecamatan Ambal, tempat Desa Ambalresmi berada, ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang berperan sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan sosial ekonomi skala kecamatan. Penetapan ini menunjukkan bahwa kawasan Ambal secara fungsional telah diakui dalam struktur ruang kabupaten. Namun demikian, pengakuan tersebut lebih berorientasi pada fungsi administratif dan ekonomi wilayah, dan belum secara spesifik menetapkan situs-situs *heritage* di Ambalresmi, seperti kompleks Kadipaten Ambal, Kepatihan, dan Masjid Kauman Al-Musthofa, sebagai bagian dari

kawasan cagar budaya dalam peta rencana pola ruang.

Ketidakjelasan delineasi spasial ini berimplikasi pada lemahnya jaminan perlindungan ruang terhadap situs-situs *heritage* yang berada di Desa Ambalresmi dari potensi alih fungsi lahan maupun pembangunan fisik yang tidak terkendali di sekitarnya. Tanpa penetapan eksplisit sebagai kawasan cagar budaya atau kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya, sebagaimana dimungkinkan dalam ketentuan RTRW, posisi *heritage* Ambalresmi dalam tata ruang Kabupaten Kebumen saat ini baru berada pada tingkat pengakuan administratif wilayah kecamatan, dan belum mencapai tingkat perlindungan spasial yang memiliki kekuatan hukum khusus.

Analisis Pemetaan Stakeholder dalam Pengelolaan Situs *Heritage* Ambalresmi

Keberhasilan integrasi *heritage* Ambalresmi ke dalam perencanaan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan kapasitas yang berbeda-beda. Identifikasi pemangku kepentingan menjadi penting untuk memahami pembagian peran, potensi sinergi, maupun potensi kesenjangan kepentingan dalam pengelolaan kawasan *heritage*. Berdasarkan hasil penelusuran data dan dokumentasi lapangan, pemangku kepentingan yang teridentifikasi terlibat dalam pengelolaan *heritage* Ambalresmi dapat dipetakan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.
Pemetaan Stakeholder

Pemangku Kepentingan dan Peran Utamanya	Kepentingan dan Tantangan
Pemerintah Kabupaten Kebumen (Bapperida, Disparbud, Dinas PUPR) sebagai regulator dan juga fasilitator dalam merumuskan kebijakan, mengintegrasikan <i>heritage</i> ke dalam RPJMD, RTRW, RKPD, dan menyediakan infrastruktur pendukung	Memiliki kewenangan dalam pengambilan Kebijakan, tetapi fokus dan alokasi anggaran untuk sektor <i>heritage</i> khususnya di Desa Ambalresmi masih terbatas dibandingkan dengan sektor lainnya.
Pemerintah Desa Ambalresmi , Sebagai pengelola, penggerak partisipasi dan kesadaran warga, serta sebagai pihak yang melakukan usulan pembangunan pada masa Musrenbang.	Memiliki konektifitas yang tinggi dengan keberadaan situs <i>heritage</i> , tetapi masih terbatas dari sisi regulasi dan pembiayaan yang berskala besar.
Komunitas budaya dan seniman lokal (dalang, pengrajin wayang, pelaku kethoprak) , Pelaku pelestarian seni aktif dalam menjaga keberlangsungan kesenian, menghidupkan aktivitas Kampung Jawa.	Memiliki kepentingan kultural yang tinggi dan modal sosial, tetapi rentan terhadap persoalan regenerasi dan keterbatasan dukungan finansial serta fasilitas.
Akademisi dan perguruan tinggi , sebagai mitra dalam melakukan riset, dokumentasi, dan pendampingan teknis penelitian sejarah, kajian konservasi, hingga program pengabdian kepada masyarakat	Berkepentingan pada pengembangan sektor keilmuan dan juga pendidikan, namun keberlanjutan serta kontribusinya sangat bergantung pada kemitraan formal yang dijalin dengan pemerintah daerah.
Sektor swasta dan pelaku UMKM sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi melalui investasi, pembiayaan berkala, pengembangan produk wisata, kuliner, dan kerajinan	Memiliki kepentingan dalam peningkatan potensi ekonomi melalui situs <i>heritage</i> , tetapi dalam pelaksanaannya membutuhkan regulasi dan insentif untuk melakukan investasi.
Wisatawan dan masyarakat luas Sebagai penerima manfaat sekaligus sebagai pelaksana kontrol sosial terhadap kualitas pengelolaan kawasan <i>heritage</i> .	Memiliki kepentingan dalam peningkatan kualitas pengalaman wisata dan edukasi, namun partisipasinya bergantung pada aksesibilitas dari informasi dan promosi yang dilakukan.

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Pemetaan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan tertinggi dalam menentukan arah kebijakan, tetapi belum disertai dengan tingkat prioritas yang proporsional terhadap situs *heritage* Ambalresmi. Sebaliknya, pemerintah desa dan komunitas budaya memiliki kedekatan dan kepentingan yang tinggi terhadap pelestarian situs, tetapi terbatas dari sisi kewenangan dan sumber daya. Kesenjangan antara kewenangan (*power*) dan kepentingan (*interest*) di antara para pemangku kepentingan ini menegaskan pentingnya mekanisme kolaborasi formal, seperti forum multipihak atau kelompok kerja (*pokja*) *heritage* Ambalresmi, yang dapat menjembatani kepentingan pemerintah, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta secara setara dan berkelanjutan.

Potensi *Heritage* Ambalresmi Dalam Pembangunan Daerah

Potensi *Heritage* di Desa Ambalresmi, Kecamatan Ambal memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Kebumen khususnya dalam aspek penguatan terhadap identitas lokal, pelestarian terhadap budaya daerah, dan pengembangan sektor pariwisata berbasis sejarah. Keberadaan situs-situs bersejarah seperti kompleks Kadipaten Ambal, Kepatihan Ambal, Masjid Kauman Al-Musthofa, Makam Mbah Jogoresmi, serta Kompleks Kampung Jawa menunjukkan bahwa Desa Ambalresmi merupakan kawasan yang strategis dan penting dalam sektor pemerintahan, keagamaan, dan juga kebudayaan pada masa lalu. Jejak sejarah tersebut merepresentasikan peran penting dari Desa Ambalresmi dalam dinamika politik dan juga administrasi di daerah pesisir selatan Jawa pada abad ke-19, baik dalam konteks kepemimpinan tradisional maupun pemerintahan kolonial. Kekayaan ini juga dapat menjadi modal kultural yang bernilai tinggi untuk dikembangkan sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal sekaligus penguatan jati diri masyarakat Kebumen.

Potensi *heritage* Ambalresmi dapat diintegrasikan dalam strategi pembangunan di berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, hingga sosial. Situs-situs *heritage* tersebut memiliki ketertarikan tematik yang sangat kuat, mulai dari sejarah pemerintahan (Bangunan Kadipaten dan Kepatihan), perkembangan islam

(Masjid Kauman Al-Mustofa), hingga tokoh lokal dan sejarah permukiman (Makam Mbah Jogoresmi dan Kampung Jawa). Apabila situs-situs tersebut dikelola secara lebih terpadu dalam satu kawasan desa wisata berbasis sejarah, Ambalresmi berpeluang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang tidak hanya menawarkan objek fisik saja akan tetapi juga narasi sejarah, arsitektur tradisional, serta aktivitas budaya seperti kesenian daerah dan tradisi religius yang melekat pada kehidupan masyarakat.

Tabel 2.
Kinerja Sektor Kebudayaan

Indikator	Capaian
Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (Persen)	11,50%
Jumlah pengunjung tempat bersejarah (Orang)	46.636
Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam 1 tahun terakhir (Persen)	46%
Cagar budaya	Benteng Van Der Wijck, Masjid Soko Tunggal, Rumah Sakit DKT Gombong, Gudang SMP Negeri 1 Prembun, Makam Kolopaking, Makam Tirtokusumo, Makam Purbanegara, Makam Bodronolo, Punden Berundak Lurah Karsa di Desa Giyanti dan Lingga Yoni di Desa Sumberadi

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen, 2026

Potensi *heritage* di Desa Ambalresmi memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercermin dalam kinerja sektor kebudayaan daerah. Berdasarkan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2026, persentase pelestarian Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) pada tahun 2024 baru mencapai 11,50%. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan ke objek bersejarah

menunjukkan kecenderungan menurun hingga mencapai 46.636 kunjungan pada tahun 2024, serta tingkat keaktifan kelompok kesenian yang masih relatif rendah, yaitu sekitar 46%. Sejalan dengan kondisi tersebut, hingga tahun 2026 situs-situs *heritage* di Desa Ambalresmi juga belum tercatat sebagai Cagar Budaya Kabupaten Kebumen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pemanfaatan pada situs-situs *heritage* masih belum dilaksanakan secara optimal, baik dari aspek perlindungan aset, intensitas kunjungan, maupun partisipasi pelaku seni. Kondisi tersebut mengindikasikan masih lemahnya integrasi antara pengelolaan cagar budaya, pengembangan pariwisata, dan pemberdayaan komunitas budaya dalam sistem pembangunan daerah. Padahal, potensi *heritage* di Ambalresmi yang meliputi Situs Kadipaten Ambal, Kepatihan, Masjid Kauman Al-Musthofa, Makam Mbah Jogoresmi, dan Kampung Jawa dapat menjadi aset strategis untuk meningkatkan kinerja sektor kebudayaan dan pariwisata daerah apabila dikelola secara terpadu.

Pelestarian bangunan bersejarah, tata ruang tradisional, dan praktik budaya dapat menjadi landasan dalam perencanaan wilayah yang erat kaitannya dengan nilai sejarah, dan sosial budaya masyarakat. Integrasi antara pelestarian cagar budaya dengan kebijakan pembangunan daerah seperti pengembangann infrastruktur, pendidikan, dan pariwisata akan memperkuat posisi Desa Ambalresmi sebagai kawasan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Kebumen. Dengan berbagai potensi yang dimiliki Desa Ambalresmi, situs-situs *heritage* tidak hanya berfungsi sebagai warisan sejarah masa lalu saja, tetapi juga sebagai sumber daya pembangunan yang mampu mendorong inovasi perencanaan pembangunan daerah, memperkuat identitas daerah, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi *Heritage* Dalam Inovasi Perencanaan

Inovasi perencanaan pembangunan berbasis *heritage* di Desa Ambalresmi dapat diarahkan dengan menjadikan situs-situs bersejarah, seperti Kadipaten Ambal, Kepatihan Ambal, Makam Mbah Jogoresmi, dan Kampung Jawa, sebagai aset utama dalam strategi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen.

Pendekatan ini menempatkan warisan budaya tidak hanya sebagai peninggalan masa lalu saja, tetapi juga sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki nilai ekonomi, sosial, budaya, dan pembentuk identitas daerah. Melalui pelestarian dan pemanfaatan adaptif (*adaptive reuse*), situs-situs bersejarah di Ambalresmi dapat dikembangkan sebagai pusat edukasi sejarah, ruang aktivitas budaya masyarakat, serta destinasi wisata tematik yang terintegrasi dalam sistem perencanaan wilayah. Revitalisasi bangunan bersejarah, seperti rumah Bupati di kompleks Kadipaten, Kepatihan, dan kawasan Masjid Kauman, dapat dilakukan dengan tetap menjaga keaslian arsitektur, namun difungsikan sebagai museum atau situs budaya lokal, pusat informasi sejarah, atau ruang publik berbasis budaya. Upaya ini sejalan dengan prinsip dari ekonomi sirkular karena memanfaatkan kembali aset yang telah ada, memperpanjang umur bangunan, menghemat sumber daya pembangunan, serta tetap menjaga nilai-nilai kearifan lokal dalam penataan ruang daerah.

Integrasi *heritage* Ambalresmi dalam inovasi perencanaan pembangunan daerah berperan penting dalam memperkuat identitas lokal dan kohesi sosial. Narasi sejarah Ambal sebagai pusat pemerintahan, kawasan religius, dan ruang budaya masyarakat Jawa dapat diangkat dalam perencanaan pembangunan daerah, desain ruang publik, serta program pendidikan dan pariwisata. Keberadaan Kampung Jawa, tradisi seni, berbagai situs, serta tokoh sejarah seperti Mbah Jogoresmi dapat menjadi dasar untuk pengembangan wisata budaya dan religi yang bersifat edukatif. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga berperan sebagai pelaku utama dalam pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan warisan budaya, sehingga rasa memiliki terhadap kawasan dan identitas daerah semakin kuat pada masyarakat.

Agar pengembangan berbasis *heritage* di Ambalresmi berjalan lebih efektif, diperlukan sinergi dari multi-pihak antara pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, pelaku budaya, dan sektor swasta. Pemerintah berperan dalam perumusan kebijakan, perlindungan cagar budaya, dan penyediaan infrastruktur pendukung, sementara masyarakat dan komunitas budaya berperan dalam menjaga nilai-nilai tradisi serta menghidupkan aktivitas kesenian. Kolaborasi ini memungkinkan

terbentuknya kawasan *heritage* Ambalresmi sebagai pusat kegiatan sejarah, budaya, dan ekonomi kreatif yang terintegrasi, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, berkarakter, dan berbasis identitas lokal di Kabupaten Kebumen.

Strategi Implementasi Integrasi *Heritage* Ambalresmi dalam Peerencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan hasil analisis kebijakan, tata ruang wilayah, regulasi, hingga pemangku kepentingan, integrasi *heritage* Ambalresmi ke dalam perencanaan Pembangunan daerah memerlukan strategi implementasi yang sistematis dan juga bertahap. Strategi ini disusun kedalam tiga waktu yaitu strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang disesuaikan dengan timeline perencanaan Pembangunan daerah Kabupaten Kebumen, khususnya periode RPJMD Tahun 2025-2029.

1. Strategi Jangka Pendek (1-2 Tahun)

- a. Melakukan inventarisasi dan pendaftaran situs-situs *heritage* Ambalresmi sebagai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke dalam sistem registrasi nasional cagar budaya, sebagai langkah awal menuju penetapan status Cagar Budaya melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).
- b. Membangun koordinasi lintas perangkat daerah antara Bapperida, Disparbud, Dinas PUPR, dan Pemerintah Desa Ambalresmi untuk menyamakan basis data dan peta sebaran situs *heritage*.
- c. Melakukan sosialisasi nilai penting *heritage* Ambalresmi kepada masyarakat dan generasi muda guna menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya pelestarian.

2. Strategi Jangka Menengah (3-5 Tahun)

- a. Mendorong penyusunan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kabupaten Kebumen sebagai payung hukum operasional di tingkat kabupaten, sekaligus mengintegrasikan *heritage* Ambalresmi secara eksplisit ke dalam RKPD tahunan dan evaluasi tengah periode RPJMD Tahun 2025-2029.

- b. Mengusulkan penetapan kawasan *heritage* Ambalresmi sebagai bagian dari kawasan cagar budaya atau kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya pada peninjauan kembali RTRW Kabupaten Kebumen.
 - c. Membentuk kelembagaan pengelola bersama, seperti kelompok sadar wisata (Pokdarwis) atau badan pengelola kawasan *heritage*, yang melibatkan pemerintah desa, komunitas budaya, ahli waris bangunan bersejarah, dan sektor swasta.
 - d. Mengembangkan Desa Ambalresmi sebagai desa wisata tematik berbasis sejarah pemerintahan, religi, dan budaya Jawa yang terintegrasi dengan Kampung Jawa, dilengkapi paket wisata edukatif dan program kunjungan sekolah.
- #### **3. Strategi Jangka Panjang (5 Tahun)**
- a. Mengembangkan digitalisasi *heritage* melalui platform interpretasi sejarah berbasis digital (situs web, aplikasi, atau tur virtual) untuk memperluas aksesibilitas informasi dan daya tarik wisatawan generasi muda.
 - b. Memperkuat ekonomi kreatif berbasis *heritage* melalui pengembangan UMKM kerajinan, kuliner tradisional, dan jasa pemandu wisata yang terhubung dengan rantai nilai pariwisata Kabupaten Kebumen secara lebih luas.
 - c. Membangun kemitraan jangka panjang dengan perguruan tinggi, komunitas pelestarian budaya nasional, dan lembaga internasional untuk mendukung riset, pendanaan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan *heritage*.
 - d. Melaksanakan evaluasi berkala terhadap dampak integrasi *heritage* Ambalresmi pada indikator pembangunan daerah, seperti tingkat kunjungan wisata, pendapatan ekonomi kreatif masyarakat, dan persentase pelestarian cagar budaya pada dokumen RKPD.

Penerapan strategi implementasi secara bertahap ini diharapkan dapat memastikan bahwa integrasi *heritage* Ambalresmi dalam perencanaan pembangunan daerah tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar terjabarkan ke dalam kebijakan, kelembagaan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat yang terukur dan berkelanjutan.

Tantangan dan Peluang Integrasi *Heritage*

Tantangan

- a. Degradasi Fisik dan Risiko Kerusakan, Sebagian bangunan bersejarah telah berusia tua dan rentan terhadap kerusakan akibat faktor-faktor dari alam, usia material, maupun aktivitas manusia. Tanpa penanganan konservasi yang tepat, nilai historis dan keaslian bangunan berpotensi hilang.
- b. Keterbatasan Integrasi dalam Dokumen Perencanaan, Potensi *heritage* sering kali belum terintegrasi secara optimal dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RTRW, RPJMD, dan rencana sektor pariwisata, sehingga pengembangannya belum memiliki arah kebijakan yang kuat.
- c. Ancaman Komersialisasi Berlebihan, Pengembangan pariwisata yang tidak terkendali berisiko menggeser nilai sakral, historis, dan sosial situs *heritage*, sehingga fungsi budaya dapat tereduksi menjadi semata-mata objek ekonomi.

Peluang

- a. Pengembangan Pariwisata Budaya dan Edukasi, Kekayaan situs sejarah di Ambalresmi berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata tematik yang mengintegrasikan sejarah pemerintahan, religi, dan budaya Jawa, sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisata dan pendapatan daerah.
- b. Penguatan Identitas dan Kebanggaan Lokal, Pelestarian *heritage* dapat memperkuat identitas kultural masyarakat Kebumen, menumbuhkan rasa bangga terhadap sejarah daerah, serta memperkuat kohesi sosial.
- c. Revitalisasi Kawasan Berbasis Kearifan Lokal, Konservasi dan pemanfaatan adaptif bangunan bersejarah membuka peluang penataan kawasan yang berkarakter, ramah

lingkungan, dan berkelanjutan tanpa harus mengorbankan nilai historis.

- d. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan UMKM, Aktivitas wisata *heritage* dapat mendorong tumbuhnya usaha berbasis budaya, seperti kerajinan, kuliner tradisional, pertunjukan seni, dan jasa pemandu wisata, yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kemitraan Multipihak dan Akses Pendanaan Alternatif, Pengembangan kawasan *heritage* membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas budaya, sektor swasta, serta lembaga nasional dan internasional di bidang pelestarian budaya, sehingga dapat memperluas sumber pembiayaan dan penguatan kapasitas pengelolaan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *heritage* Ambalresmi mencakup Kadipaten Ambal, Kepatihan Ambal, Masjid Kauman Al-Musthofa, Makam Mbah Jogoresmi, dan Kampung Jawa yang memiliki nilai historis, sosial, dan ekonomi yang signifikan sebagai representasi sejarah pemerintahan, keagamaan, dan kebudayaan di pesisir selatan Jawa. Namun, potensi tersebut belum terintegrasi secara optimal ke dalam kebijakan pembangunan daerah: posisinya dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2029 masih bersifat normatif tanpa program prioritas, indikator kinerja, maupun alokasi anggaran yang spesifik, sementara dalam RTRW Tahun 2024-2044 baru diakui sebatas fungsi administratif kecamatan tanpa delineasi spasial sebagai kawasan cagar budaya yang berkekuatan hukum. Kesenjangan ini diperparah oleh belum adanya Peraturan Daerah Cagar Budaya di tingkat kabupaten meskipun dukungan regulasi telah tersedia secara berjenjang dari tingkat nasional hingga provinsi, serta oleh ketimpangan antara kewenangan dan kepentingan di antara pemangku kepentingan. Pemerintah daerah memegang kewenangan kebijakan tertinggi namun dengan perhatian yang masih terbatas, sedangkan pemerintah desa, komunitas budaya, dan ahli waris bangunan bersejarah memiliki kepentingan besar namun keterbatasan kewenangan dan sumber daya. Kondisi ini

menegaskan bahwa keberhasilan integrasi *heritage* Ambalresmi ke depan sangat bergantung pada strategi implementasi bertahap yang mencakup aspek regulasi, kelembagaan, pendanaan, dan partisipasi masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kerangka analisis integrasi *heritage* dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menggabungkan empat dimensi yang selama ini cenderung dikaji terpisah dalam literatur RPJMD, RTRW, regulasi multi-jenjang, dan pemangku kepentingan sekaligus memperluas cakupan studi *heritage* di Indonesia yang umumnya berfokus pada situs ikonik berskala kota atau nasional ke arah *heritage* berskala desa pada level pemerintahan akar rumput (*grassroots level*), yang relatif belum banyak dieksplorasi.

Secara praktis, temuan ini memberikan dasar empiris bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mengintegrasikan *heritage* Ambalresmi secara eksplisit pada evaluasi tengah periode RPJMD dan peninjauan kembali RTRW, mendorong percepatan penyusunan Peraturan Daerah Cagar Budaya sebagai payung hukum operasional, serta menjadi acuan pembentukan forum kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, pemerintah desa, komunitas budaya, akademisi, dan sektor swasta; kerangka analisis dan strategi implementasi yang dihasilkan juga berpotensi direplikasi oleh kabupaten/kota lain dengan karakteristik *heritage* berskala lokal yang serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendokumentasikan kekayaan sejarah Ambalresmi, tetapi menawarkan kerangka analisis dan basis kebijakan yang konkret untuk mewujudkan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang berkelanjutan dan berbasis identitas lokal.

Saran

Berdasarkan temuan utama dan kontribusi pada penelitian ini maka peneliti merumuskan strategi kebijakan yang disegmentasikan berdasarkan kelompok kelompok stakeholder agar setiap pihak dapat memiliki arah tindak lanjut yang jelas dan sapat saling melengkapi, berikut adalah saran yang dirumuskan oleh peneliti:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen (Bapperida dan Disparbud)

Memanfaatkan jalur kelembagaan melalui Geopark Kebumen yang sudah berstatus UNESCO Global Geopark untuk mengintegrasikan kedalam *cultural heritage*. Mengingat Geopark Kebumen memperoleh dukungan kebijakan dan pendanaan yang relatif kuat dalam RPJMD Tahun 2025–2029, *heritage* Ambalresmi dapat diposisikan sebagai bagian dari jalur geowisata (*geotrail*) yang memadukan warisan geologi dan warisan budaya dalam satu narasi kepariwisataan terpadu, sehingga turut memperoleh limpahan dukungan kebijakan, promosi, dan pembiayaan yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh sektor warisan geologi (*geoheritage*).

2. Bagi Pemerintah Desa dan Pokdarwis Ambalresmi
Membentuk organisasi pengelola kolaboratif berbadan hukum, seperti koperasi berbasis pariwisata yang mengelola retribusi kunjungan dengan skema bagi hasil yang jelas antara pemerintah desa, pokdarwis, dan ahli waris bangunan *heritage*, guna memastikan keberlanjutan pembiayaan operasional dari sumberdaya yang digunakan.
3. Bagi Sektor Swasta dan Masyarakat
Mengembangkan skema pembiayaan inovatif berbasis kemitraan public dan swasta (*Public Private Partnership*) guna mendorong pembiayaan Pembangunan sebagai alternatif diluar anggaran APBD yang selama ini menjadi sumber utama pembangunan tetapi jumlahnya masih terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggratya, P. A. R., M, D. A., Prayuda, D. S., & Kosala, M. D. H. (2025). Potensi Dan Tantangan Heritage Tourism di Kota Mataram. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(1), 454–470.
<https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i1.74>
- Cresswell, J. W. (2013). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publication.
- Diklat LPKN. (2025). Perencanaan pembangunan daerah, dimulai dari mana? Diiklat LPKN. Diakses pada tanggal 12 Januari 2026.

<https://diklatlpkn.id/2025/04/23/perencanaan-pembangunan-daerah-dimulai-dari-mana/>

- Fahril, F., & Kurniati, A. C. (2018). Pelestarian Urban Heritage Berdasarkan Upaya Perlindungan Terhadap Bangunan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta. *Prosiding Nasional Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi XIII*, 369–376. <http://journal.sttnas.ac.id/ ReTII>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI*. Sumatera Barat: PT. GLOBALEKSEKUTIF TEKNOLOGI. <https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>
- Halimah, U. N., & Kurniati, E. (2025). Sinergi Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan. *Journal of Social Science and Multidiciplinary Analysis*, 2(2), 1–19. <https://doi.org/10.59827/jossama.v2i2.42>
- Hilman, C., & Armadi. (2025). Kontribusi Pemuda Dalam Pembangunan Sosial dan Inovasi. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 2(3), 548–563.
- Ikatandinas. (2025). Arti kata heritage: Menjaga warisan budaya Indonesia. Ikatandinas.com. Diakses pada tanggal 12 Januari 2026. <https://ikatandinas.com/arti-kata-heritage-menjaga-warisan-budaya-indonesia/>
- Kesaulya, H. M., Aswad, W. O. S. J., & Rasyid, R. (2025). Implementasi Sustainable Heritage Tourism Untuk Mendukung Pengembangan Wisata Heritage di Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(4), 1601–1612. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4.7991>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. SAGE Publication.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen (2024) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No.1 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 2024-2044, Pemerintah Kabupaten Kebumen (2024).
- Pemerintah Kabupaten Kebumen. (2025). Peraturan Bupati Kebumen Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Kebumen.
- Pemerintah Kabupaten Kebumen (2025) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (2025). <https://jdih.kebumenkab.go.id/v2/index.php/web/Home/detail/3651>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Ra'is, D. U., Setyawan, D., & Dimus, Y. (2020). Efektivitas Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu. *Jurnal Reformasi*, 10(2), 228–235. <https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.1910>
- Rustamana, A., Siti Salwa, N., Annas, N., Al Bahri, Z., Junaedi, A. R., Sakthiawan, H. T., & Sofwatunidah, A. (2026). Menanamkan Kesadaran Akan Jati Diri Sebagai Bangsa Indonesia dan Kesadaran Untuk Mempertahankan Jati Diri Bangsa di Tengah Globalisasi. *Pengertian Integrasi Nasional, Integrasi Nasional dalam Masyarakat Pluralitas, Strategi Mewujudkan Integrasi Nasional. Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 186–194. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/1296>
- Sabila, N. N., & Suswandi, I. (2025). Toponimi

Nama-Nama Desa di Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Kajian Antropolinguistik. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 11(4), 4344–4358.
<https://doi.org/10.30605/onoma.v11i4.7059>

Sampoerna University. (2024). Apa itu Integrasi: contoh, jenis dan faktor pendorongnya. Diakses pada tanggal 12 Januari 2026.
<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/news/apa-itu-integrasi-jenis-contoh-dan-faktor-pendorongnya>

Sekarsari, R. W., & Putra, L. R. (2023). Analisis Pembangunan Kayutangan Heritage Dari Formulasi Sampai Dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang. *Public Corner*, 18(2), 139–154.
<https://doi.org/10.24929/fisip.v18i2.3062>

Universitas Ciputra. (2022). Mengenal inovasi adalah perubahan untuk membantu semua makhluk hidup. Diakses pada tanggal 12 Januari 2026.
<https://www.ciputra.ac.id/dme/mengenal-inovasi-adalah-perubahan-untuk-membantu-semua-makhluk-hidup/>

BIODATA PENULIS

Bagus Anggit Saroyo, lahir di Kebumen, 14 Mei 2005. Mahasiswa S1 Program Studi Administrasi Publik Universitas Negeri Yogyakarta. Aktif dalam Center for Governance and Policy Analysis sebagai Research Assistant.

Nur Khamid, lahir di Kebumen, 23 November 2006. Mahasiswa S1 Program Studi Fisika dari Universitas Diponegoro. Aktif sebagai tutor di bimbingan belajar Jenius Private Semarang.